

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan laporan mengalami penurunan tekanan inflasi, namun tetap diatas level sasaran target inflasi nasional ($3,00 \pm 1\%$ (yoy)). Inflasi tahunan Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2022 tercatat 5,96% (yoy), turun apabila dibandingkan dengan triwulan III 2022, yaitu 6,73% (yoy) namun lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 2,20% (yoy). Secara kumulatif, inflasi tahun berjalan selama tahun 2022 sebesar 5,96% (ytd), lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2021 yang tercatat 2,20% (ytd). Secara umum, Inflasi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menunjukkan tren meningkat. Peningkatan tekanan inflasi bersumber dari beberapa peristiwa penting sepanjang tahun 2022 khususnya pada triwulan II dan III 2022 yang mengalami peningkatan tekanan tinggi akibat penyesuaian harga komoditas energi oleh pemerintah, penyesuaian harga BBM subsidi dan mismatch antara sisi penawaran dan permintaan.

Top 3 Komoditas dengan andil penyumbang inflasi tertinggi hingga akhir tahun 2022

1. Bensin 0.89% (ytd)
2. Bahan Bakar Rumah Tangga 0.60% (ytd)
3. Tukang Bukan Mandor 0,56% (ytd)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Penurunan tekanan inflasi tahunan pada di triwulan laporan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan turunnya tekanan inflasi dari triwulan sebelumnya. Di sisi penawaran penurunan tekanan dirasakan pada komoditas tarif angkutan udara, cabai rawit, minyak goreng, cabai merah, dan ikan cakalang. Dari sisi permintaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada dalam zona optimis yang didorong oleh pencapaian vaksinasi, pelonggaran aktifitas masyarakat secara lebih luas, pelaksanaan event daerah dan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berbagai program pengendalian inflasi secara masif oleh berbagai pihak terkait serta besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan tekanan inflasi sepanjang Tahun 2022 melalui rapat koordinasi mingguan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan peserta Pemerintah Daerah seluruh dan Pihak stakeholder lainnya menjadi faktor penurunan tekanan dari sisi penawaran pada triwulan laporan.

Tekanan inflasi dari faktor permintaan terindikasi mengalami peningkatan sejalan dengan masih optimisnya masyarakat terhadap kondisi ekonomi, meskipun tidak lebih dominan dari faktor penawaran. Rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan laporan masih berada pada level optimis. Membaiknya perekonomian global dan nasional, komitmen dan berbagai kebijakan pemerintah terhadap perekonomian, program bantuan sosial pemerintah, pelonggaran mobilitas masyarakat secara lebih luas pada triwulan laporan berdampak pada keyakinan konsumen di Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Beberapa hal yang telah dilakukan TPID

Provinsi Sulawesi Tengah selama triwulan IV 2022 antara lain :

- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tengah terus berkoordinasi dalam rangka pengendalian harga agar tingkat inflasi tetap berada pada kisaran targetnya sesuai amanat TPID melalui peningkatan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif).

Mencermati perkembangan inflasi yang terus mengalami peningkatan beberapa bulan terakhir Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Bank Indonesia melakukan beberapa kegiatan guna melanjutkan semangat sinergi pengendalian inflasi dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), pada 3 Oktober 2022 dengan tagline "Mositande, Masugi Ngata: Ayo Bersinergi Kendalikan Inflasi". Sinergi tersebut diwujudkan melalui pencanangan program Manajemen Pola Tanam Sulawesi Tengah yang Terintegrasi (MATA TANI).

- TPID di Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah pada tanggal 13 Desember di Sutan Raja untuk membahas langkah strategis pengendalian harga kebutuhan bahan pokok, berdasarkan pembahasan dalam rapat koordinasi daerah TPID Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, maka dirumuskan rekomendasi dan langkah - langkah yang harus dilakukan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah yaitu:

1. menetapkan kebijakan dan rekomendasi dalam pengendalian Inflasi di wilayah Sulawesi Tengah. program pengendalian inflasi TPID kota/kabupaten/provinsi di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat difokuskan untuk memperkuat ketersediaan pasokan melalui penggunaan teknologi digital untuk pertanian dan realisasi kad.

2. keterjangkauan harga melalui implementasi perdagangan digital untuk menunjang pasar murah.

3. regulasi yang mendukung kelancaran distribusi serta koordinasi untuk pemantauan pasokan dan harga bahan pangan.

4. peningkatan dan perbaikan kualitas data untuk mendukung kebijakan dan monitoring pergerakan komoditas pertanian dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

5. program bantuan modal kepada petani cabai dan nelayan untuk meningkatkan produksinya.

6. pelaksanaan kerja sama antar daerah (kad) intra Provinsi Sulawesi Tengah.

7. penyediaan spbu bagi nelayan (skim insentif) yang menjual hasil tangkapan di dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

8. perluasan implementasi urban farming di kota palu dan pembuatan Kota Luwuk.

9. mekanisme dan penerbitan aturan tata niaga komoditas yang mengalami defisit secara insidental.

10. koordinasi & monev kebijakan pengendalian inflasi terjadwal dan terprogram.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan laporan Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan tekanan, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Berbagai faktor yang bersumber dari eksternal yang selanjutnya berdampak pada sisi internal Provinsi Sulawesi Tengah mendorong peningkatan tinggi tekanan inflasi Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan TPID tidak berdampak signifikan terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah, akibat kompleksitas yang terjadi di tahun 2022 dan menyeluruh di daerah sekitar. Sumber peningkatan inflasi pada triwulan laporan utamanya dipengaruhi oleh tingginya harga acuan energi global yang mendorong Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi akibat tingginya disparitas harga. TPID Provinsi Sulawesi Tengah berusaha memitigasi dampak kenaikan BBM melalui inisiasi pertemuan dengan Organisasi Angkutan Darat, Pertamina dan Hiswana Migas sebagai upaya antisipasi dan mitigasi kenaikan tekanan pada kelompok transportasi dan bahan bakar rumah

tangga. Namun demikian, tidak adanya kewenangan Pemda pada penagturan harga menyebabkan kenaikan inflasi tinggi tidak terelakan. Secara lebih rinci, berdasarkan disagregasi inflasi, kelompok volatile food terkendali dalam rentang $3\% \pm 1\%$, yakni 3,12% (yoy). Sementara kelompok core inflation berada pada level 4,29% (yoy). Selanjutnya Adm. Price mengalami peningkatan tinggi pada kisaran 15,63% (yoy) seiring terus meningkatnya harga-harga komoditas yang diatur oleh pemerintah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Program pengendalian inflasi TPID Kota/Kabupaten/Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat difokuskan untuk memperkuat ketersediaan pasokan melalui penggunaan teknologi digital untuk pertanian dan realisasi KAD, keterjangkauan harga melalui implementasi perdagangan digital untuk menunjang pasar murah, regulasi yang mendukung kelancaran distribusi serta koordinasi untuk pemantauan pasokan dan harga bahan pangan.

- Ketersediaan Pasokan

1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dengan implementasi metode tanam yang juga mampu meningkatkan kualitas produk.
2. Penerapan Urban Farming: Mendorong Masyarakat untuk secara kontinyu menanam komoditas utama penyumbang inflasi melalui kemandirian pangan Rumah Tangga (Contoh: Kelompok Masyarakat Lorong Sintuvu)
3. Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan bantuan tepat guna, misalnya dengan inisiasi kapal untuk kelompok nelayan yang bisa digunakan melaut jauh

- Keterjangkauan Harga

Secara rutin melaksanakan survei pemantauan harga pasar melalui PIHPS maupun sidak lapangan yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah.

Implementasi perdagangan digital melalui e-commerce lokal/Grab/Go-Jek dan mengoptimalkan peran platform tani online sebagai kios penyeimbang yang juga terhubung dengan aplikasi marketplace dan ojek online.

Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana produksi komoditas penting daerah sesuai kebutuhan petani dengan tingkat harga yang wajar

Meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah komoditas bahan pangan utama baik secara online dan offline utamanya sebelum mendekati HBKN atau pada saat terjadi gejolak harga di Masyarakat

- Kelancaran Distribusi

Memastikan distribusi barang antar provinsi untuk komoditas strategis berjalan lancar, baik darat, maupun laut.

Meningkatkan koordinasi dengan BUMN untuk kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka memastikan pasokan terjaga sehingga tidak terjadi gangguan distribusi barang.

Meningkatkan peran pelabuhan, a.l memberikan prioritas bongkar-muat bagi barang/komoditas pangan strategis utamanya bahan pokok dibandingkan komoditas lainnya. Melakukan upaya digitalisasi melalui aplikasi e-commerce lokal dalam rangka memudahkan masyarakat menerima bahan pangan.

Mewujudkan digitalisasi informasi pangan agar diperoleh data yang faktual mengenai surplus dan defisit masing-masing daerah untuk mendukung perdagangan antar

- Komunikasi Efektif

Pengelolaan ekspektasi masyarakat melalui Komunikasi pimpinan daerah ke media masa.

Melaksanakan Sosialisasi melalui berbagai platform digital termasuk media sosial terkait

informasi harga pangan strategis dan tingkat ketersediannya

Mensinergikan Program pengendalian Inflasi yang telah disusun oleh TPID Prov dan Kab/Kota dengan program kerja OPD terkait

Koordinasi dan sinergi antara beberapa institusi seperti BUMN, BUMD dan Bumdes serta lembaga terkait dalam rangka pengendalian inflasi untuk menyusun program strategis pengendalian inflasi daerah.